



Ketua Dewan Cium Praktik Ijon Pendirian Tower

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah titik lokasi menara telekomunikasi atau tower baru mulai bermunculan. Padahal, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang menara telekomunikasi dan fiber optik di Kota Yogya belum disahkan.

Hal ini membuat pimpinan dewan tetap berupaya untuk membentuk tim pengawasan. Hal itu dimaksudkan untuk memantau komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) dalam penertiban tower

ilegal pascapengesahan raperda tersebut.

Ketua DPRD Kota Yogya, Sujanarko menjelaskan telah mendapatkan laporan banyaknya temuan titik tower baru yang bermunculan. Titik tersebut berupa cor beton baru, yang diperkirakan untuk pendirian tower.

"Kami mempertanyakan adanya titik-titik cor beton untuk tower ilegal ini. Apakah ini praktik ijon, jadi pesan

tempat baru pasanginya nanti," ujar Sujanarko, kemarin.

Politisi partai PDI Perjuangan ini menjelaskan, pihaknya dan bersama fraksinya di PDI P mempertanyakan hal tersebut. Pasalnya, dia memperkirakan praktik ijon ini memanfaatkan aturan dalam Perda yang memungkinkan pendirian tower baru.

● ke halaman 14

Ketua Dewan Cium Praktik Ijon

● Sambungan Hal 13

Jaminan

Dia menyebutkan, pengesahan raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik kembali dijadwalkan untuk disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Yogya, Jumat (12/5) mendatang. Pengesahan tersebut setelah ada jaminan tiga bulan setelah disahkan, eksekutif akan melakukan penindakan pada menara telekomunikasi yang

melanggar.

Jika kesepakatan tersebut dilanggar DPRD Kota Jogja menyiapkan mengajukan hak interpelasi. "Untuk itu, maka perlu dibentuk pansus atau tim untuk mengawasi komitmen Pemkot menindak tower ilegal pasca pengesahan raperda ini," ujarnya.

Dia menyebut, komitmen penertiban tower ilegal dari Pemkot Yogya tersebut menjadi ganjalan belum disahkannya raperda tersebut. Pada 20 Maret 2017 lalu sudah diagenda-kan sidang paripurna untuk penetapan perda tower seluler. Namun, agenda itu terpaksa

sa dibatalkan lantaran ada kekisruhan di internal dewan. Khususnya menyangkut keberadaan tower seluler ilegal yang masih leluasa beroperasi.

Kepala Sat Pol PP Kota Yogya, Nurwidhiartana menyatakan pihaknya akan menjalankan ketentuan penertiban sesuai aturan. Pihaknya juga sejauh ini sudah memiliki komitmen menegakkan perda sesuai peraturan perundangan.

"Kami tetap memiliki komitmen untuk menertibkan sesuai tahapan. Peraturan wali kota sebagai juknis dalam melaksanakan perda pun diperlukan," ulasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005